

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kemiskinan menurut Yulaswati (2018) yaitu suatu kondisi dimana ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasarnya seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Dengan seiring perkembangan zaman kemiskinan lagi tidak hanya dilihat dari rendahnya pendapatan saja, tetapi juga dilihat dari kemampuan lain seperti bersosialisasi dan berpolitik.

Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) saat mengukur kemiskinan. Melalui pendekatan tersebut ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan serta bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan. (Data Dan Informasi Kemiskinan Kabupaten\_Kota Tahun 2021)

Kemiskinan membuat jutaan rakyat terbatas dalam memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan. Bahkan menyebabkan anak-anak tidak bisa mendapatkan pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak adanya investasi, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus urbanisasi ke kota (Prawoto dan Selatan, 2009)

Kemiskinan kini menjadi masalah yang perlu di perhatikan serius untuk semua pihak, baik dari pihak pemerintah ataupun masyarakat, dengan demikian kemiskinan dikatakan salah satu fenomena yang bersifat global. Problema

kemiskinan terus menjadi masalah besar sepanjang sejarah Indonesia sebagai sebuah negara. Kemiskinan merupakan kondisi di mana mereka berada dalam kehidupan yang tidak layak dan tidak sejahtera (Masruroh & Zuber, 2014)

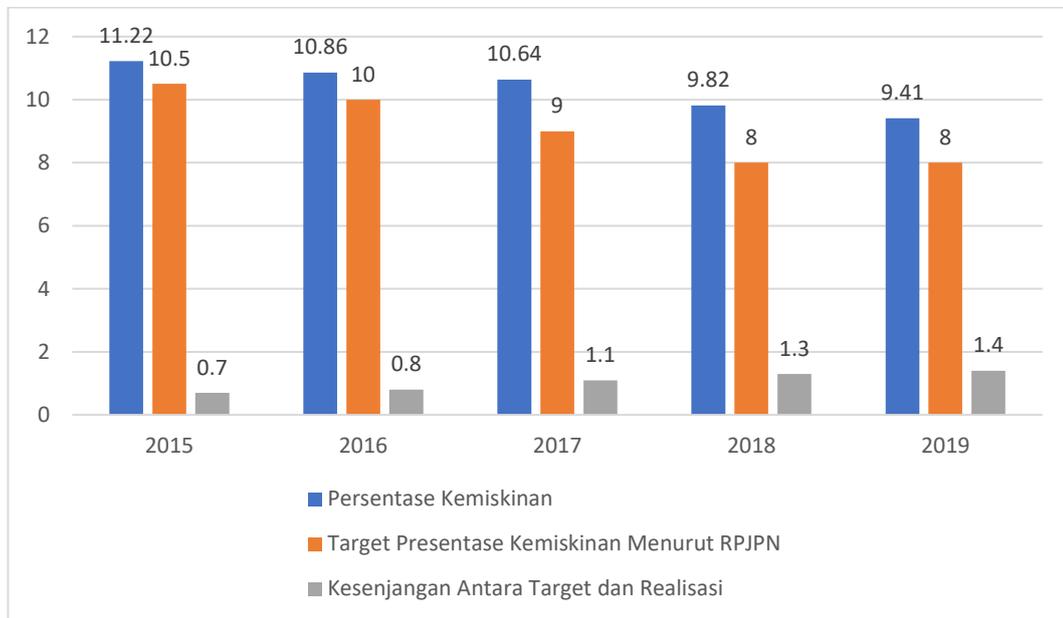
Masalah kemiskinan di Indonesia masih menjadi pembahasan yang sangat krusial, karena konsekuensinya yang tidak hanya meliputi ruang lingkup ekonomi saja namun juga masalah sosial dan politik dalam negeri. Oleh karena itu, pengentasan masalah kemiskinan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan ekonomi, baik jangka pendek maupun jangka Panjang. (Pratama, 2014)

Istilah kemiskinan timbul pada saat seorang ataupun sekelompok orang tidak sanggup mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang diduga sebagai kebutuhan minimum. Upaya penanggulangan di Indonesia telah menjadi prioritas dalam rencana kerja pemerintah yang dituang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional( RPJPN) (Sianturi dkk, 2021)

Berikut disajikan data persentase kemiskinan di Indonesia:

**Tabel 1. 1**

**Presentase Kemiskinan di Indonesia**



Sumber : Sianturi dkk, 2021

Pada gambar diatas dapat diketahui bahwa persentase pada tahun 2015 terjadi kemiskinan tertinggi kemudian menyusut pada tahun 2019. Namun penurunan persentase kemiskinan belum sesuai dengan target pemerintah yaitu sebesar 8% di tahun 2019. Hal ini disebabkan data yang menunjukkan kesenjangan antara target penyusutan kemiskinan dengan terlaksananya peningkatan dari tahun 2015 hingga tahun 2019 (Sianturi dkk, 2021)

Aspek yang mempengaruhi kemiskinan ialah tidak seimbangnya antara Pertumbuhan ekonomi dan belanja publik tidak sesuai target, Maka upaya dalam menganggulangi kemiskinan belum efektif. (Rohadin dkk, 2019)

Guna terciptanya kualitas hidup terbaik bagi manusia dibutuhkan kebijakan pemerintah lewat pemberian tunjangan pendapatan, pelayanan kemasyarakatan, dan tunjangan sosial lainnya (M. Sidiq, 2021)

Dampak yang terjadi dari kemiskinan akan berdampak pada bidang Pendidikan dan Kesehatan. Pada bidang pendidikan akibat yang akan terjadi yakni bertambahnya jumlah anak yang putus sekolah, serta pola pikir rasa keinginan untuk masa depan yang lebih baik. Sedangkan dari bidang Kesehatan akibat yang akan terjadi yakni rentan terkena penyakit dan ibu hamil akan mengalami kekurangan gizi yang seimbang sehingga mempengaruhi pertumbuhan pada janin (Dueramae, 2017)

Dalam islam pun dijelaskan bahwa kemiskinan harus segera diatasi sebagaimana dijelaskan dalam ayat dibawah :

QS. Al-Baqarah [2/87]: 215

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ  
السَّبِيلِ قُلْ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, “Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan.” Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.

Dari ayat di atas dapat diartikan bahwa Allah menyuruh kita untuk berinfak. Sebagian dari harta kita yang mana artinya bahwa kita hidup di dunia harus saling memberi, membantu, dan menolong kepada sesama manusia.

Oleh sebab itu pemerintah sudah berupaya untuk mengatasi permasalahan kemiskinan, upaya penanggulangan kemiskinan yang berlaku di Indonesia antara lain ialah Jaring Pengaman Sosial (JPS), Subsidi Langsung Tunai (SLT), Beras Miskin (Raskin), Asuransi Kesehatan untuk Masyarakat Miskin (Askeskin), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM). Dalam tersebut telah dilakukan untuk memberikan peluang kepada masyarakat miskin dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya (Casiavera, 2017)

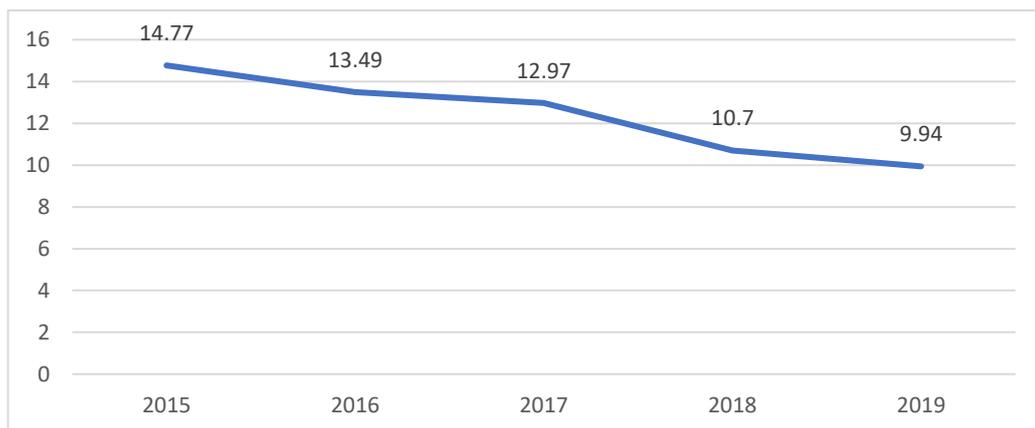
Pemerintah Indonesia telah mengembangkan strategi pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak diikuti dengan pemerataan distribusi pendapatan pada semua golongan masyarakat. Sehingga terjadi penurunan pada kualitas dari aspek antara pertumbuhan dan pemerataan bukannya peningkatan atau biasa disebut trade off (Prawoto dan Selatan, 2009)

Aspek penting untuk strategi penanggulangan kemiskinan yaitu tersedianya data kemiskinan yang akurat. Kemudian pengukuran kemiskinan dipercaya dapat menjadi instrumen bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Data kemiskinan dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah yang telah dilaksanakan untuk menanggulangi masalah

kemiskinan, kemudian menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka (Data Dan Informasi Kemiskinan Kabupaten\_Kota Tahun 2021)

Ukuran kemiskinan dapat dibangun pada aspek perekonomiannya, aspek Sumber Daya Manusia( SDM), permasalahan sosial serta keluarga/ rumah tangga. Berdasarkan informasi Badan Pusat Statistik( BPS) Kabupaten Cirebon, tingkatan kemiskinan Kabupaten Cirebon semenjak 2017 sampai 2019 mengalami trend yang menyusut. Perihal ini jadi salah satu gejala keberhasilan pemerintah Kabupaten Cirebon dalam mengatasi kemiskinan. Perihal ini dapat dilihat di Kabupaten Cirebon dalam presentase penduduk miskin(%) pada Tahun 2017- 2019 data tabel berikut. (Rohadin, 2019)

**Tabel 1. 2**  
**Jumlah Penduduk Miskin (%) di Kabupaten Cirebon.**



Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional 2020

Tabel 1.2 diatas memberikan informasi bahwa Tahun 2017 angka kemiskinan sebesar 12,97% mengalami penyusutan pada Tahun 2018 dengan angka kemiskinan 10,70%, setelah itu mengalami penyusutan angka kemiskinan pada Tahun 2019 sebesar 9, 94% dari jumlah penduduk di Kabupaten Cirebon. Dengan begitu dalam kurun waktu 3 tahun, Kabupaten Cirebon mengalami penyusutan angka kemiskinan sebesar 3,03 persen dari jumlah penduduk di Kabupaten Cirebon.

Namun dibalik menurunnya angka kemiskinan di Kabupaten Cirebon nyatanya tetap mengalami fluktuasi penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Cirebon tiap tahunnya. Sementara itu Kabupaten Cirebon mempunyai kemampuan untuk tingkatkan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Cirebon. Salah satu aspek yang berakibat pada penyerapan tenaga kerja merupakan rata-rata lama sekolah dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Rata-rata lama sekolah menjadi penanda penting bahwa tiap wilayah memiliki sumber daya manusia yang baik serta berkualitas maka nantinya akan sangat mudah memperoleh pekerjaan yang diharapkan ( Khoirunnisa, 2019)

Dengan demikian dalam mengantisipasi peningkatan angka kemiskinan di Kabupaten Cirebon, Pemerintah telah membuat beberapa kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan, salah satu program pemerintah sebagai upaya untuk menanggulangi masalah kemiskinan adalah Program Keluarga Harapan (PKH) yang terkenal di Indonesia, program ini mulai dilaksanakan sejak tahun 2007. Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan

kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya (Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, 2015)

Tujuan Program Keluarga Harapan( PKH) merupakan memberdayakan keluarga Rumah Tangga Sangat Miskin( RTSM) serta menolong kurangi kemiskinan dengan metode meningkatkan mutu sumber daya manusia pada kelompok warga miskin, Meningkatkan keadaan sosial ekonomi, Meningkatkan taraf pendidikan kanak- kanak Tangga Sangat Miskin( RTSM), Meningkatkan status kesehatan anak serta gizi ibu mengandung, serta anak dibawah 6 tahun dari Tangga Sangat Miskin( RTSM), Meningkatkan akses mutu pelayanan pendidikan serta Kesehatan (Lubis & Zubaidah, 2020)

Ketentuan kepesertaan Program Keluarga Harapan( PKH) merupakan memenuhi 3 komponen ialah: Komponen kesehatan antara lain adanya Ibu Mengandung, Memiliki anak bayi serta Anak Usia Sekolah. Komponen kedua ialah Komponen pembelajaran ialah mempunyai anak yang bersekolah di SD, SMP, serta SMA. Komponen ketiga ialah Komponen kesejahteraan sosial ialah mempunyai anggota keluarga penyandang disabilitas berat, serta mempunyai anggota keluarga lanjut usia yang berumur 60 tahun keatas. Program Keluarga Harapan( PKH) pula wajib terdaftar serta muncul di tiap sarana kesehatan serta pendidikan terdekat. Kewajiban KPM PKH di bidang kesehatan meliputi pengecekan isi untuk ibu hamil, pemberian kesehatan konsumsi gizi serta imunisasi dan timbang badan anak bayi serta anak prasekolah (Beni dkk, 2020)

## **1.2. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini hanya membatasi masalah Berdasarkan identifikasi masalah yang muncul dalam studi kasus lapangan, maka diperlukan pembatasan masalah, sehingga ruang lingkup permasalahan dari latar belakang dapat lebih jelas. Di desa Kalikoa sendiri merupakan desa yang dikelilingi oleh industry seperti adanya pabrik pembuatan kecap, pabrik pembuatan olahan dari jengkol, dan lain sebagainya. Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat didaerah setempat yang termasuk miskin, hal tersebut yang menarik bagi penulis sehingga tertarik untuk meneliti didaerah tersebut

## **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas terdapat rumusan masalah yaitu Seberapa efektif Program Keluarga Harapan (PKH) dari pemerintah terhadap penanggulangan kemiskinan di Desa Kalikoa, Kabupaten Cirebon ?

## **1.4. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui seberapa besar efektif bantuan dari pemerintah untuk penanggulanagan kemiskinan di Desa Kalikoa, Kabupaten Cirebon melalui Program Keluarga Harapan (PKH).

## **1.5. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah dapat berguna untuk penelitian selanjutnya dan dapat dikembangkan teori-teori lainnya pada penelitian selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pembaca atau masyarakat penelitian ini dapat menambah informasi mengenai bantuan sosial yang berlaku di Indonesia dan masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan sosial benar – benar mendapatkan hak bantuannya.
- b. Bagi Penulis, penelitian ini memberi pengetahuan tentang bagaimana efektivitas PKH dalam mengatasi permasalahan ekonomi bagi masyarakat miskin.